

**PERJANJIAN WARALABA: ANTARA PEMILIK ROTI JOHN  
UNCLE MOY DENGAN MITRA USAHA**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**DHITA SUSILOWATI**

**C100160208**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PERJANJIAN WARALABA: ANTARA PEMILIK ROTI JOHN UNCLE**  
**MOY DENGAN MITRA USAHA**

**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh:

**DHITA SUSILOWATI**

**C100160208**

**Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:**

**Dosen**

**Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kelik Wardiono', is written over a horizontal line.

**(Dr. Kelik Wardiono, S.H, M.H)**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERJANJIAN WARALABA: ANTARA PEMILIK ROTI JOHN UNCLE MOY  
DENGAN MITRA USAHA**

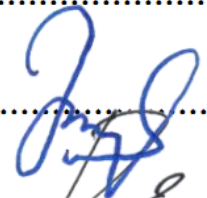
**OLEH  
DHITA SUSILOWATI  
C100160208**

**Telah diterima dan dishkan di Depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Kamis, 9 Juli 2020  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**


**1.Dr. Kelik Wardiono, S.H, M.H  
(Ketua Dewan Penguji)**

  
(.....)

**2.Inayah, S.H., M.Hum  
(Anggota I Dewan Penguji)**

  
(.....)

**3.Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N.  
(Anggota II Dewan Penguji)**

  
(.....)



**Dekan**

**Dekan**

**Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum  
NIK. 537/NIDN. 0727085803**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis ataupun diterbitkan oleh orang lain, kecuali tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 15 Mei 2020

Penulis



**DHITA SUSILOWATI**

**C100160208**

## **PERJANJIAN WARALABA: ANTARA PEMILIK ROTI JOHN UNCLE MOY DENGAN MITRA USAHA**

### **Abstrak**

Perdagangan di Indonesia saat ini banyak didominasi oleh perdagangan barang dan jasa yang merupakan kerjasama antara pengusaha Indonesia dan pengusaha asing, atau antara pengusaha lokal dan pengusaha lokal. Salah satu kerjasama barang dan jasa tersebut adalah franchise (waralaba). Terlebih dalam praktik bisnis waralaba di Indonesia, tidak jarang dijumpai peran para pengusaha UMKM selain sebagai penerima waralaba mereka juga berperan sebagai pemberi waralaba. Waralaba adalah salah satu cara yang berhasil dalam memperluas usaha dalam bentuk kemitraan yang didasarkan pada suatu hubungan yang sama-sama menguntungkan antara franchisor (pemberi waralaba) dengan franchisee (penerima waralaba). Dalam melaksanakan waralaba, terlebih dahulu dilakukan perjanjian antara kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum dan perlindungan hukum antara pemberi waralaba (Franchisor) dan penerima waralaba (Franchisee) pada waralaba Roti John Uncle Moy telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah Roti John Uncle Moy dalam melaksanakan perjanjian waralaba dalam usahanya telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

**Kata kunci:** perjanjian, waralaba, hubungan hukum

### **Abstract**

Trade in Indonesia is currently dominated by the trading of goods and services which is a collaboration between Indonesian businessman and foreign entrepreneurs, or between local entrepreneurs and local entrepreneurs. One of the corporation of goods and services is fanchise. In terms of franchise business practices in Indonesia, it is not uncommon to have the role of UMKM entrepreneurs as well as their franchises. In implementing the fanchise, the agreement is first made between the two parties. The study aims to determine the legal relationship and legal protections between franchisor and franchisee in Roti John Uncle Moy's franchise in accordance with applicable laws. The method used is the Normative Juridical and the data source used is secondary data. The result of this research is Roti John Uncle Moy in implementing a franchise agreement in it's bussiness in accordance with applicable laws.

**Keywords:** agreement, franchise, legal relations

## **1. PENDAHULUAN**

Di Indonesia, pertumbuhan franchise berawal dari masuknya kerjasama waralaba asing sekitar tahun 1980-1990an yang dipelopori oleh jaringan-jaringan waralaba asing seperti KFC, McDonalds, Burger King dan Wendys yang masuk ke Indonesia menjadi awal perkembangan Franchise (Sumarsono, 2009). Terlebih

dalam praktik bisnis waralaba di Indonesia, tidak jarang dijumpai peran para pengusaha UMKM selain sebagai penerima waralaba mereka juga berperan sebagai pemberi waralaba (Serfiyani dan Purnomo, 2015). Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 58/M-DAG/PER/9/2014, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019, *waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba*. Sedangkan menurut Asosiasi Franchise Indonesia, waralaba adalah suatu sistem pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan akhir, dimana pemilik merek (franchisor) memberikan hak kepada individu atau perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur, dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu dan meliputi area tertentu.

Waralaba adalah salah satu cara yang berhasil dalam memperluas usaha dalam bentuk kemitraan yang didasarkan pada suatu hubungan yang sama-sama menguntungkan antara franchisor (pemberi waralaba) dengan franchisee (penerima waralaba) (Idrus, 2017). Pemilik metode dikenal dengan franchisor sedangkan pihak yang diberi hak untuk menggunakan metode tersebut dikenal dengan franchisee. Dengan kata lain, franchisee diberi hak untuk menggunakan produk, merek dagang maupun sistem bisnis yang dibuat oleh franchisor (Basarah dan Mufidin, 2008). Melalui sistem waralaba, kegiatan usaha pengusaha kecil di Indonesia dapat berkembang dengan menggunakan resep, teknologi, kemasan, manajemen pelayanan, dan merek dagang/jasa pihak lain dengan membayar royalty berdasarkan perjanjian (Katrinasari, 2017).

Di dalam menyelenggarakan kerjasama waralaba harus berdasarkan perjanjian tertulis yang harus dibuat terlebih dahulu antara pemberi waralaba dan penerima waralaba sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba sebelum pemberi waralaba dan penerima waralaba melakukan kegiatan bisnis waralaba guna untuk menjamin aspek kepastian hukum dan perlindungan hukum. Terutama

bagi salah satu pihak yang dirugikan karena tidak melaksanakan klausul perjanjian yang telah disepakati. dalam suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang saling mengikat akan timbul suatu hak, kewajiban dan tanggung jawab bagi masing-masing pihak tersebut. Hak tersebut antara lain, seperti hak teritorial yang dimiliki oleh franchisee, persyaratan lokasi, ketentuan pelatihan, biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh franchisee kepada franchisor, ketentuan lama waktu perjanjian waralaba dan berbagai hal lain yang mengatur hubungan yang akan dilaksanakan antar franchisor maupun franchisee. Perjanjian waralaba tersebut dibuat dan disusun berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang mengatakan bahwa *perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*. Selain itu, terdapat asas konsensualisme yang dijelaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian lahir pada saat para pihak memenuhi 4 (empat) unsur yaitu: (1) para pihak sepakat untuk mengikat diri, (2) para pihak cakap untuk membuat perjanjian, (3) mengenai suatu hal tertentu dan, (4) sebab yang halal (Lasamahu, 2006). Dalam aspek perlindungan hukum pihak penerima waralaba pada umumnya cenderung dalam keadaan yang lebih lemah dibandingkan dengan pihak pemberi waralaba, maka bentuk dari perlindungan hukum tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba yang bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak penerima waralaba supaya mereka tidak dirugikan. Karena dalam melaksanakan bisnis waralaba, penerima waralaba harus tunduk terhadap isi perjanjian yang telah dibuat dan ditentukan oleh pemberi waralaba (Rusli, 2015).

Dengan adanya suatu perjanjian akan timbul hubungan hukum diantara kedua belah pihak sebagai konsekuensi dari kesepakatan atas persetujuan pihak-pihak pembuatnya, sehingga menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian antara para pihak sebagaimana layaknya undang-undang yang menjadi dasar bahwa para pihak harus mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian tersebut beserta akibat hukum yang dikehendaki, namun di dalam melakukan perjanjian terkadang mengalami hambatan dimana terdapat pihak yang tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati atau pihak tersebut telah

melakukan wanprestasi. Menurut Pasal 1239 KUHPdata, wanprestasi adalah *“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”*.

Setelah terdapat hak dan kewajiban, maka dalam melaksanakan kegiatan waralaba tersebut timbul adanya suatu tanggung jawab hukum yang melekat pada para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Tanggung jawab hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum. Sehingga dalam perjanjian waralaba tersebut akan berfungsi sebagai perlindungan pada perjanjian bagi pihak-pihak yang mengikatkan diri di dalam klausul perjanjian waralaba (Sakti, 2015).

Dalam perjanjian franchise yang akan diteliti, pihak franchisee sebagai pihak yang diberi hak untuk mengolah, memproduksi dan memasarkan produk hanya bergantung pada isi perjanjian yang telah dibuat dan disusun oleh pihak franchisor. Maka pihak franchisee memiliki kedudukan yang lemah dibandingkan dengan pihak franchisor, karena dalam penyusunan tersebut pihak franchisee tidak diberi kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam pembuatan dan penyusunan klausul perjanjian. Pihak franchisee harus mengikuti isi klausul perjanjian yang telah ada.

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian adalah: *pertama*, bagaimana hubungan hukum dari para pihak yang terlibat dalam perjanjian waralaba roti john uncle moy dan *kedua*, bagaimana perlindungan hukum dari para pihak yang terlibat dalam perjanjian waralaba roti john uncle moy.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum dari para pihak yang terlibat dalam perjanjian waralaba roti john uncle moy dan untuk mengetahui perlindungan hukum dari para pihak yang terlibat dalam perjanjian waralaba roti john uncle moy.

Adapun manfaat dari penelitian ini secara teoritis untuk menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya terkait perjanjian waralaba, perlindungan hukum para pihak serta akibat hukum yang ditimbulkan dalam perjanjian tersebut dan untuk penulis dapat menjadika pengalaman penelitian



yang berkaitan dengan perjanjian waralaba khususnya tentang hubungan hukum dan perlindungan hukum, dan untuk memberikan pengetahuan, wawasan serta manfaat bagi masyarakat mengenai perjanjian waralaba terhadap perlindungan hukum maupun akibat hukumnya juga dapat menjadi pedoman dalam melakukan perjanjian waralaba.

## **2. METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yaitu dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, karena penelitian ini untuk menggambarkan gejala dan fakta atau keadaan secara mendalam dalam perjanjian waralaba.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Hubungan Hukum Dari Para Pihak Yang Terlibat Dalam Perjanjian Waralaba Roti John Uncle Moy**

Dalam perjanjian waralaba roti john uncle moy terdapat subyek hukum, yaitu Marianto Deky Hernawan, S. Psi sebagai Manusia (*natuurlijke person*) selaku pemberi franchise (*Franchisor*) dan Dian Feramitha Sari sebagai Manusia (*natuurlijke person*) selaku penerima franchise (*Franchisee*) dimana kedua belah pihak setuju untuk melakukan sistem kerjasama berupa Franchise untuk mengembangkan merek dagang roti john uncle moy di Teras Indomaret Pakel serta memproduksi dan menjual makanan dengan merek dagang roti john uncle moy. Subyek hukum dalam perjanjian franchise Roti John Uncle Moy sesuai dengan norma-norma yang berlaku maka para pihak dianggap cakap dan wajib melakukan hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai akibat hubungan hukum dalam perjanjian franchise tersebut, sebab dalam perjanjian berlaku *asa pacta sunt servanda* apabila perjanjian telah disepakati oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi para pihak dan sesuai dengan subyek hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba, Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 58/M-Dag/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER//2013/ tentang Pengembangan Kemitraan Dalam

Waralaba Jenis Usaha Jasa Makanan Dan Minuman, Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Objek dalam perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Menurut Pasal 1320 ayat (3) menjelaskan bahwa objek perjanjian harus memenuhi syarat yakni objek tersebut harus tertentu atau setidaknya objek tersebut memiliki jenis tertentu (Harahap, 1986). Objek hukum yaitu sesuatu yang berguna dan bisa dikuasai oleh subjek hukum dan juga bisa dijadikan objek dalam suatu hubungan hukum. Objek hukum tersebut biasanya berupa benda. Di dalam pasal 499 KUHPdata, yang dimaksud benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Obyek dalam waralaba, nama dan jenis Hak atas kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus menjadi objek perjanjian waralaba. Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba menjelaskan bahwa objek perjanjian waralaba yaitu memiliki ciri khas, terbukti sudah memberikan keuntungan, memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis, mudah diajarkan dan diaplikasikan, adanya dukungan yang berkesinambungan, Pasal 1 Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba yang menjelaskan bahwa ciri khas usaha adalah suatu usaha yang memiliki keunggulan atau perbedaan yang tidak mudah ditiru dibandingkan dengan usaha lain sejenis, dan membuat konsumen selalu mencari ciri khas dimaksud, misalnya sistem manajemen, cara penjualan dan pelayanan, atau penataan, atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari pemberi waralaba.

Dalam KUHPdata terdapat benda yang berwujud dan benda tidak berwujud diatur dalam pasal 503. Hak dalam perjanjian franchise tergolong dalam benda yang tidak berwujud karena berupa ijin untuk melakukan suatu kegiatan dan juga tidak bertentangan dengan undang-undang karena hak yang diberikan untuk mengembangkan suatu usaha.

Dalam perjanjian waralaba ini sudah diuraikan perihal masing-masing hak dan kewajiban para pihak sehingga para pihak dapat melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan pasal 1313 KUHPdata dan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba yang mana dalam suatu perjanjian terdapat pihak yang wajib memberikan prestasi yaitu penerima waralaba (Franchisee) yang diperjanjikan dan pihak lainnya yaitu pemberi waralaba (Franchisor) berhak atas prestasi tersebut.

Hak dan kewajiban para pihak telah diuraikan dalam pasal perjanjian waralaba dimana di dalam perjanjian waralaba tersebut telah dijelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena masing-masing pihak berhak atas suatu hal yang diterima dan juga kewajiban yang menjadi keharusan untuk dipenuhi oleh masing-masing pihak apabila tidak terpenuhi menimbulkan suatu akibat hukum.

### **3.2 Perlindungan Hukum Dari Para Pihak Yang Terlibat Dalam Perjanjian Waralaba Roti John Uncle Moy**

Dalam menjalankan kegiatan Franchise, para pihak harus sesuai dengan apa yang telah disetujui dalam perjanjian franchise dan aturan yang berlaku. Di dalam perjanjian terdapat konsekuensi apabila tidak terpenuhi prestasi yang dibebankan pada para pihak dengan wanprestasi. Wanprestasi dikarenakan tidak melaksanakan kewajiban dengan tepat waktu sebagaimana telah disepakati oleh para pihak. Suatu perjanjian memungkinkan tidak terpenuhinya suatu kewajiban antara kedua belah pihak, sehingga dalam perjanjian diatur mengenai wanprestasi yang mana salah satu pihak tidak melakukan perjanjian, melakukan perjanjian tetapi tidak tepat waktu, melakukan perjanjian tetapi keliru yang menimbulkan akibat hukum.

Perjanjian waralaba ini apabila pihak penerima waralaba (Franchisee) tidak melakukan kewajibannya, melanggar ketentuan dalam perjanjian, tersangkut masalah hukum maka pihak pemberi waralaba (Franchisor) memutuskan perjanjian waralaba secara sepihak. Hal ini tidak bertentangan dengan norma atau doktrin karena salah satu pihak lalai dalam menjalankan kewajibannya.

Di dalam perjanjian waralaba Roti John Uncle Moy tidak mengatur mengenai keadaan memaksa atau overmacht.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Perjanjian Franchise yang akan dilakukan oleh harus terdapat subjek hukum yang harus memenuhi aturan yang berlaku. Subjek hukum dalam waralaba ada dua yaitu: pertama, pemberi waralaba / Franchisor yaitu orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba. Kedua, Penerima waralaba / Franchisee yaitu orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba. Subyek hukum dalam perjanjian franchise Roti John Uncle Moy sesuai dengan norma-norma yang berlaku maka para pihak dianggap cakap dan wajib melakukan hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai akibat hubungan hukum dalam perjanjian franchise tersebut.

Dalam melakukan perjanjian harus terdapat objek hukum, dalam perjanjian waralaba ini objek hukumnya yaitu perjanjian franchise roti john uncle moy.

Kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian waralaba ini telah diuraikan masing-masing hak dan kewajiban yang mana dalam suatu perjanjian terdapat pihak yang wajib memberikan prestasi yaitu penerima waralaba (Franchisee) yang diperjanjikan dan pihak lainnya yaitu pemberi waralaba (Franchisor) berhak atas prestasi tersebut berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Perjanjian waralaba ini apabila pihak penerima waralaba (Franchisee) tidak melakukan kewajibannya, melanggar ketentuan dalam perjanjian, tersangkut masalah hukum maka pihak pemberi waralaba (Franchisor) memutuskan perjanjian waralaba secara sepihak. Hal ini tidak bertentangan dengan norma atau doktrin karena salah satu pihak lalai dalam menjalankan kewajibannya. Di dalam perjanjian waralaba Roti John Uncle Moy tidak mengatur mengenai keadaan memaksa atau *overmacht*.

### **4.2 Saran**

Dalam menjalankan waralaba pemberi waralaba / Franchisor harus memastikan bahwa penerima waralaba / Franchisee memiliki itikad baik untuk menjalankan

dan mengembangkan waralaba dan pemberi waralaba / franchisor perlu melakukan pendampingan serta pengawasan pada saat penerima waralaba melakukan waralaba ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basarah, H. moch, & H.M. Faiz Mufidin. (2008). *Bisnis Franchise Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Idrus, Norman syahdar. (2017). *Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam*. Jurnal Yuridis: 4(1)
- Katrinasari, Bella. (2017). *Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Royalty Rahasia Dagang dalam Perjanjian Waralaba*. Jurnal Private Law: 5(1)
- Lasamahu, Ferry R. (2006). *Perlindungan Hukum Terhadap Franchisee Dalam Perjanjian Waralaba (Studi Kasus: Analisis Putusan Pengadilan Antara PT. Lingkar Natura Inti Dan Nathasa Kasakeyan)*. Jurnal Hukum dan Pembangunan tahun Ke-36: (3)
- Rusli, Tami. (2015). *Analisis Terhdap Perjajian Waralaba (Franchise) Usaha Toko Alfa Mart (Studi Pada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk*. Jurnal Keadilan Progresif: 6(1)
- Sakti, Pratama Yudha. ( 2015). *Perlindungan Hukum Terhadap pekerja Musiman Di PT Perkebunan Nusantara IX (PERSERO) P.G Mojo Kabupaten Sragen*. Skripsi. Fakultas Hukum. Surakarta: universitas Muhammadiyah Surakarta
- Serfiyani, Cita Yustisia, & R. Serfianto D. Purnomo. (2015). *Franchise Top Secret – Ramuan Sukses Bisnis Waralaba Sepanjang Masa*. Yogyakarta: ANDI
- Sumarsono, Sonny. (2009). *Manajemen Bisnis Waralaba*. Yogyakarta: Graha Ilmu